



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS HASANUDDIN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD WIHARDI TJARONGE
2. Jabatan : KETUA DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL
3. NHK : 916579

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.858.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
2. Tanah Seluas 2.071 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
3. Tanah Seluas 345 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , Rp. 98.000.000
4. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
5. Tanah Seluas 470 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
6. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
7. Tanah Seluas 315 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/96 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **185.000.000**

1. MOBIL, SUZUKI 6C415V-APV Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000



2. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
80.000.000
3. MOTOR, YAMAHA B6HAT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
30.000.000
4. MOTOR, YAMAHA 2DP-RA/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000
5. MOTOR, HONDA D1B02N26L2 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	10.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.269.212.482
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.322.212.482
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.322.212.482

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.